

## ABSTRAK

### **ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025**

**(Studi di Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung)**

Oleh

**DEVAN FARID HIDAYAT**

Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menetapkan kebijakan efisiensi anggaran yang mengharuskan seluruh kementerian dan pemerintah daerah melakukan penghematan belanja non-prioritas untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Di Provinsi Lampung, kebijakan ini diterapkan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) melalui pemangkasan anggaran administratif dan penyesuaian program kerja tanpa mengganggu proyek infrastruktur utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan efisiensi anggaran di Dinas BMBK Provinsi Lampung. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, implikasi kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung diwujudkan melalui pemangkasan belanja non-prioritas, khususnya belanja administratif, tanpa menghentikan proyek infrastruktur strategis. Namun demikian, masih ditemukan kerusakan pada sejumlah ruas jalan yang menunjukkan keterbatasan capaian kinerja. Efektivitas belum optimal karena penghematan anggaran belum sepenuhnya sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik, meskipun pagu anggaran tahun 2025 mengalami peningkatan.

**Kata Kunci:** Efisiensi anggaran, Implementasi kebijakan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, *Value for Money*, keuangan publik.

## **ABSTRACT**

### ***ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF BUDGET EFFICIENCY POLICIES BASED ON PRESIDENTIAL INSTRUCTION NUMBER 1 OF 2025***

***(Study at the Lampung Provincial Public Works and Construction Agency)***

***By***

**DEVAN FARID HIDAYAT**

*The government, through Presidential Instruction No. 1 of 2025, established a budget efficiency policy that requires all ministries and local governments to cut non-priority spending in order to maintain fiscal sustainability. In Lampung Province, this policy was implemented by the Public Works and Construction Agency (BMBK) through administrative budget cuts and work program adjustments without disrupting major infrastructure projects. This study aims to analyze the implication of the budget efficiency policy at the BMBK Office of Lampung Province. The method used is descriptive qualitative with interview and documentation techniques.*

*Based on the results of the study, the implementation of budget efficiency policies based on Presidential Instruction No. 1 of 2025 at the Lampung Provincial Public Works and Construction Agency was realized through cuts in non-priority spending, particularly administrative spending, without halting strategic infrastructure projects. However, damage was still found on a number of road sections, indicating limitations in performance. However, the effectiveness has not been optimal because budget savings have not been fully aligned with the achievement of infrastructure development goals and improvements in the quality of public services, even though the 2025 budget ceiling has increased.*

***Keywords: Budget efficiency, Policy implementation, Presidential Instruction No. 1 of 2025, Value for Money, public finance.***